



KRITIS

JURNAL UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA

KRITIS

Pelindung
Willi Toisuta
Rektor

Penanggungjawab
Richard Hutapea
Direktur LPU

Ketua Dewan Redaksi
Wisnu Tri Hanggoro

Dewan Redaksi
Aris Kristyanto
Budi Lazarusli
Barkah Sancoyo
Dien Nuhamara
Johnly Poerba
Kris Herawan Timotius
Konta Intan Damanik
Loehoer Widjajanto
Sri Hartini

Sekretariat dan Usaha
Trifosa S. Widoningsih

Alamat Redaksi/Administrasi
Universitas Kristen
SATYA WACANA
Jl. Diponegoro 52 - 60
Telp. (0298) 81362, 81363,
81364
SALATIGA - 50711

ISSN 0215 - 4765

Gambar Sampul : Yuwono Setyawan

Editorial	3
Kata Pinjaman Bahasa Asing di Media Massa Indonesia : Alokasi Fungsional dan Proses Modernisasi Oleh : M. Marcellino	5
Pembakuan Bahasa dan Totalitarianisme. Oleh : Ariel Heryanto	18
Tradisi Penulisan Sastra Indonesia di Kediri. Oleh : Suripan Sadi Hutomo	29
Selingan I : S O M A T Oleh : Liek Wilardjo	43
Membaca "Cry, the Beloved Country" Melihat Keadaan di Afrika Selatan. Oleh : Nico Likumahuwa	45
Eksistensi Pemuda dan Permasalahannya Oleh : Sonny Eli Zaluchu	54
Selingan II : Quo Vadis Wanita Indonesia Oleh : Happy Warsito	61
Revolusi Teknologi Komunikasi: PELUANG dan TANTANGAN Oleh : Liek Wilardjo	64
Timbangan Buku : Kado Istimewa Bagi Pembaca Sastra Oleh : Wisnu Tri Hanggoro	73
Abstract	79
Penulis Nomor Ini	82

No. 2/Th. VII, Okt - Des, 1992

PEMBAKUAN BAHASA DAN TOTALITARIANISME¹⁾

Oleh: Ariel Heryanto²⁾



Pembakuan bahasa yang menjurus ke arah totalitarianisme perlu dicermati, karena peran yang sangat menonjol dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B) yang bertindak sebagai "Polkam"nya bahasa, yang menunjukkan kecenderungan untuk menghakimi bahasa yang dipakai oleh masyarakat dianggap tidak baik dan salah. Dalam situasi ini diperlukan sikap moderat dari dewan bahasa dengan memperhatikan kepentingan pemakai bahasa.

Pada belahan kedua 1980 an saya pernah mengkaji secara kritis asumsi dasar, gagasan dan cita-cita kebijakan berbahasa di Indonesia. Secara khusus tapi tidak eksklusif saya menyimak proyek Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B). Ringkasnya, kritik saya meliputi hal-hal berikut.³⁾

(1) **ELITISME POLITIK:** Kebijakan itu bertumpu pada asumsi bahwa ada sejenis bahasa yang **secara transendental dan universal** berpredikat "baik dan benar". Sedang bahasa yang hidup dalam masyarakat dianggap "jelek dan keliru". Kebijakan itu menyangkal kaitan bahasa dengan proses politik dan dinamika kekuasaan. Para tokohnya mengangkat

diri dan diangkat kekuasaan negara sebagai manajer dan/atau komandan **stabilitas, keamanan, dan Pembangunan** dalam sektor bahasa. Tapi mereka tidak mengaku atau

¹⁾Naskah untuk Seminar Bahasa dan Sastra Indonesia se-Jawa Timur, 20 Nopember 1992, Himpunan Mahasiswa Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia SeMa FISIP Universitas Airlangga, Surabaya.

²⁾Dosen Program Pascasarjana, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Penulis berterima kasih kepada Budiawan, Arief Budiman, dan George Yunus Aditjondro untuk komentar dan kritik atas versi awal naskah ini.

³⁾Bagi yang berminat, berikut ini beberapa tulisan dan wawancara saya tentang topik tersebut

merasa sedang berkuasa dan berpolitik.

- (2) **KOMODIFIKASI NILAI SOSIAL:** Bahasa yang "baik dan benar" itu dianggap perlu tapi langka. Bahasa dengan 'nilai-tambah' itu diproduksi dengan mengandalkan tenaga profesional, sumber daya dan dana. Maka ada panitia, proposal, dan proyek. Juga monopoli, konsultan dan konsultasi. Bahasa yang "baik dan benar" merupakan hasil kerja monopoli para ahli, persis seperti komoditi konsumsi yang lain. Perhatikan proses serupa kini sedang terjadi pada bidang "kecantikan" dan "kemesraan".
- (3) **EPISTEMOLOGI INSTRUMENTALIS:** Kebijakan itu memperlakukan bahasa pertama-tama dan terutama sebagai "alat" komunikasi yang netral, sebuah perkakas bagi mesin Pembangunan. Mirip status rakyat sebagai "sumber-

daya" Pembangunan dalam industri kapitalis: dihitung secara matematik dan statistik. Yang berguna diolah, dipindah, dikerjakan. Yang dianggap tak berguna disingkirkan. Metoda kerja pembinaan-pengembangan bahasa mirip kerja insinyur: rekayasa (*engineering*). Modalnya ketelitian, rasionalitas dan logika formal. Aturan (gramatika) dan penyeragaman (pembakuan) dengan demikian merupakan bagian kerja yang menonjol. Sanksi tak terhindarkan, walau tidak secara legal.

- (4) **MISTIFIKASI IDEOLOGI:** Pembinaan bagi kebijakan bahasa bersumber dari ideologi nasionalistik. Seakan-akan kebijakan itu menunjang kepentingan dan kesejahteraan bangsa. Maka muncul semacam pemurnian bahasa dari unsur-unsur yang dianggap asing. Bukan saja yang dari Barat (khususnya Inggris), tapi juga secara selektif

bagian dari buku

"Daya Hidup Orang-Orang Kebanyakan", dalam *Dinamika Budaya dan Politik dalam Pembangunan*, disunting Fauzie Ridjal and M. Rusli Karim, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hal. 55-64.

dari jurnal

"The Making of Language: Developmentalism in Indonesia", *Prisma; The Indonesian Indicator*, 50, (1990): 40-53.

"Berjangkitnya Bahasa-bangsa di Indonesia", *Prisma*, 18, 1, (1989): 3-16.

"The Development of 'Development'", terjemahan Nancy Lutz, *Indonesia*, 46, (1988): 1-24.

"Kekuasaan, Kebahasaan dan Perubahan Sosial", *Kritis*, 1, 3, (1987): 4-53.

"Pembangunan, Kebudayaan, Kerakyatan", *Bina Dharma*, 4, 14, (1986): 76-88.

dari harian

"Ganasnya Bahasa, Ganasnya Kekuasaan", *Kompas*, 30 April 1985, 4.

"Kritik Untuk Politik Bahasa 'Baik' Dan 'Benar'", *Sinar Harapan*, 24 Oktober 1985, 6, 7.

dari wawancara

"Biarkan Saja Bahasa Rakyat, Tak Perlu Dibina", pewawancara Djoko Pitono Hadiputro dan Rochimdakas, *Surabaya Post*, 10 Juli 1988

"Orang Indonesia Berbahasa Indonesia; Kritik dan Evaluasi", pewawancara Alizami Ramli dan Ildhal Kasim, *Solusi*, 1, 1, (1986): 11-16.

yang berasal dari Asia (bahasa Cina) yang dikerjakan pejabat Negara di luar P3B. Mitologi "kepribumian" dikukuhkan pandangan esensialis tentang "jati-diri" atau "kepribadian nasional".⁴⁾

Saya bukan orang pertama atau satu-satunya yang mengkritik P3B. Tapi pada waktu itu sebagian terbesar kritik terhadap P3B mempersoalkan kekurangan teknis dalam pelaksanaan kerja P3B. Misalnya aturan ejaan kurang konsisten. Asumsi dasar, ideologi, epistemologi, cita-cita, dan legitimasi politik proyek pembinaan-pengembangan bahasa itu sendiri tak digugat. Biasanya bahkan didukung!⁵⁾

MEMPERLUAS LINGKUP PER-SOALAN

Sampai hari ini saya masih bertahan dengan pandangan diatas. Tapi kini saya merasa perlu memper-

luas pokok-pokok kajian tersebut, dengan memanfaatkan kritik kolega dan kajian sosial yang tidak secara langsung berpusat pada soal-soal kebahasaan.

Dua kritik bagus terhadap tulisan saya yang terdahulu saling berkaitan. Pertama: sejauhmana program P3B telah berhasil menguasai, menyeragamkan, mengkomodifikasi, atau merekayasa bahasa dan kehidupan sosial? Mungkin saja P3B berniat ambisius dan keliru, tapi ini tidak berarti mereka punya kemampuan melaksanakan niat itu sehingga perlu dikuatirkan. Kedua: apakah masyarakat kita semudah itu dibodohi oleh kebijakan resmi dalam bidang bahasa? Kalau pun program P3B mampu menjangkau masyarakat luas, apakah masyarakat tak melawan, menangkis, atau mempertahankan otonomi? Kedua tanggapan itu menyetujui isi kritik saya terhadap P3B, tapi dengan jitu mereka menunjukkan bahwa kritik saya lingkungnya masih terlalu sempit.⁶⁾

⁴⁾Ironinya, justru produk baru yang dianggap lebih "nasional" itu seringkali jauh lebih "asing" bagi masyarakat Indonesia ketimbang istilah dari bahasa lain yang sudah diambil-alih dan dianggap milik sendiri. Khusus tentang masalah ini saya pernah tulis dalam artikel untuk koran: "Yang Nasional, Yang Asing", *Kompas*, 13 Juni 1986, 4,5.; "Bahasa Asing, Ilmu Asing", *Suara Pembaruan*, 16 Februari 1988, 6, 8.; "Istilah Asing dan Pembangunan", *Kompas*, 19 Februari 1988, 4.

⁵⁾Banyak pihak pernah keliru, menduga seakan-akan kritik Sutan Takdir Alisjahbana terhadap P3B di akhir dekade yang lalu cukup

mendasar sehingga menyangkut keberadaan lembaga itu secara keseluruhan. Alisjahbana segera membuat ralat, menyatakan bahwa ia sekedar mengkritik orientasi program P3B bukan mengusulkan pembubarannya. Mereka yang tahu sejarah kebijakan bahasa di Indonesia tidak akan menyalah-pahami Alisjahbana seperti itu. Alisjahbana adalah salah satu Bapak Perencanaan, Pembinaan dan Pengembangan bahasa Indonesia.

⁶⁾Kritik jenis yang pertama, saya terima antara lain dari Dede Oetomo lewat korespondensi pribadi (1987). Kritik kedua saya peroleh dari James Scott dalam seminar "Reflection on Development", Bellagio (Italia) 1988. Kepada mereka saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya.

Dari individu-individu yang terlibat dalam program P3B, saya memperoleh bantahan, apologia dan membenaran-diri, selain kecaman.⁷⁾

Tiga pokok pikiran mereka yang penting: (a) program P3B dikatakan tidak bermaksud memaksakan, tapi hanya menawarkan "bahasa yang baik dan benar"; (b) secara umum perkembangan bahasa akan liar dan jalan-berpikir akan kacau jika tidak dibina dan diarahkan;⁸⁾ (c) secara khusus di bidang ilmu, dikatakan bahwa pembakuan bahasa merupakan keniscayaan yang mutlak.

⁷⁾Banyak dari kritik ini tidak terpublikasikan. Contoh yang terpublikasikan ialah Yus Badudu, "Bahasa Indonesia Bahasa Kita", *Kompas*, 15 Mei 1985, 4; dan El Way [Liek Wilardjo], "Mendupak Istilah Asing", *Kritis*, Vol. 5, No. 2, 52-55. Yang pertama tidak menyebut nama atau tulisan saya secara langsung, tapi mengacu pada hal-hal yang saya persoalkan dalam "Ganasnya Bahasa..." dan diterbitkan segera setelah tulisan saya itu dimuat harian yang sama. Yang kedua dibuka dengan gambaran bahwa yang saya kerjakan ialah sekedar "berani nyleneh".

⁸⁾Ada yang mempertanyakan jika saya mengkritik bahasa yang "baik dan benar", mengapa saya menggunakan bahasa itu sendiri dalam melancarkan kritik saya. Singkatnya, dua tanggapan saya begini. Pertama, benar bahwa kritik terhadap bahasa yang diresmikan P3B memang bisa disusun denganganggangangangangangang bahasa yang lain dan sangat anti-resmi. Tetapi semua itu adalah kemungkinan dari banyak pilihan strategi, dan tak ada yang secara universal bersifat paling efektif. Tidak ada kritik atau perlawanan macam apa pun, bagaimana pun radikalnya, terhadap suatu hegemoni yang tidak berpijak di bumi realita yang dikritik -- artinya kompromi tak pernah bisa secara total terelakkan.

Kedua, dengan mengkritik **pemusatan** bertumbuhnya suatu bahasa tidak berarti saya

Sudah saatnya kebijakan berbahasa dikaji ulang lebih luas dari lingkup proyek P3B. Apakah persoalan itu hanya serius dalam benak staf P3B, klien dan pengkritiknya? Atau juga dalam masyarakat luas? Sejauhmana kepentingan Negara dan ilmuwan (linguis khususnya) ditanamkan dalam program P3B? Sejauhmana kepentingan kedua kelompok itu saling-mendukung dan saling-bertentangan? Sejauhmana kasus Indonesia dapat dibandingkan dengan masyarakat-masyarakat lain?

Dalam kesempatan yang sangat sempit ini saya hanya akan memusatkan perhatian pada dua thema pokok. Pertama, kaitan antara kebijakan berbahasa dengan watak Negara. Kedua, karena setiap kasus punya kekhasan, kasus Indonesia perlu dirinci lebih tajam. Masalah perlawanan terhadap hegemoni bahasa resmi, jika ada yang bisa disebut demikian, tak bisa dibahas secara memadai disini.

KEBIJAKAN BAHASA BAGI NEGARA

Sejarah Perencanaan Bahasa resmi/baku (termasuk pembinaan dan pengembangan) cukup univer-

menolak proses bertumbuhnya bahasa itu. Hanya mereka yang menderita sindrom stabilitas-keamanan militerisme akan melihat sistem komando sebagai satu-satunya sumber ketertiban. Menolak **monopoli** dan **birokratisasi** pembentukan tata-cara berbahasa tidak dengan sendirinya berarti mengusulkan kegiatan berbahasa tanpa aturan sama sekali.

sal. Sejarah itu lebih tepat dipahami sebagai bagian dari sejarah sepa-
terjang Negara moderen, ketimbang
ilmu sosial dan humaniora, khusus-
nya linguistik. Tapi sebaliknya,
sejarah Negara bukan sejarah
bahasa.

Di Indonesia perencanaan
bahasa bukan gejala baru ciptaan
Orde Baru. Tapi sekarang inilah
masa paling meriah baginya di se-
panjang sejarah Indonesia mer-
deka.⁹⁾ Satu-satunya masa lain
dengan kemeriahan serupa di negeri
ini ialah masa kolonial Belanda,
tepatnya awal dekade kedua abad
ini. Di luar dan di antara rentang
kedua masa itu, kebijakan bahasa
terlantar. Dan mungkin karena itu
kehidupan berbahasa dan sastra
pada waktu itu bertumbuh sangat
dinamis.

Cikal bakal negara Hindia
Belanda, yang juga cikal-bakal
Republik Indonesia, yakni VOC juga
merupakan perintis kebijakan ber-
bahasa di kepulauan Nusantara.
Sejak abad 17 hingga 19 mereka
memperdebatkan pembentukan dan

bahasa 'persatuan' bagi administrasi
kekuasaannya.¹⁰⁾ Motivasi-nya jelas:
mengoptimalkan efisiensi peng-
hisapan kekayaan alam dan tenaga
rakyat.

Bukan saja bangsa, teritori ke-
satuan tanah-air, dan kelembagaan
negara Indonesia merupakan produk
penjajahan Belanda. Apa yang kini
secara resmi disebut Bahasa Indo-
nesia merupakan ciptaan proyek
pemerintah kolonial tahun 1901
lewat sebuah panitia kerja pimpinan
Charles Adriaan van Ophujsen.¹¹⁾
Biang pelembagaan kebijakan ber-
bahasa di negeri ini terjadi di tahun
1908, dengan sasaran khusus me-
nandingi (tanpa melarang!) terbitan-
terbitan nasionalisme berbahasa
revolusioner.¹²⁾

¹⁰⁾Lihat John Hoffman, "A Foreign
Investment: Indies Malay to 1901", *Indonesia*,
27, (1979): 65-92.

¹¹⁾Ibid. Juga Lars S. Vikor, *Perfecting
Spelling*, (Dordrecht: Foris Publications, 1988);
*Pedoman Edjaan Bahasa Indonesia yang Dis-
empumakan*, (Jakarta: Departemen Pen-
didikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
1972), hal. 1.

Pengertian Bahasa Indonesia sebagai
bahasa yang "diciptakan" van Ophujsen dan
kemudian dikembangkan Sutan Takdir Alis-
jahbana pernah disejajarkan dengan penger-
tian khasanah resmi *Kesusasteraan Indonesia*
moderen sebagai "ciptaan" Professor A.
Teeuw, yang kemudian dipelihara H.B. Jassin.
Parallelisme ini saya dengar dari ceramah
(1992 di USA) Professor Henk Meier, bekas
murid dan kini pengganti Teeuw ketika ia
pensiun.

¹²⁾Lahir dan pertumbuhan lembaga
pusat yang mengatur dan mengontrol bahasa
resmi dari *Commissie voor de Volkslectuur*,
sejak 1917 disebut Balai Pustaka, hingga
menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan

⁹⁾Kemeriahan ini diawali dengan berdiri-
nya Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa (1 April 1975). Lebih dari seratus
tenaga profesional dikerahkan menanganinya,
dengan sarana fisik, dana, otoritas dan jaringan
kelembagaan negara yang belum pernah lebih
besar. Bukan saja sekolah dan media massa
yang dijangkau forum kampanye berbahasa
"baik dan benar". Lembaga legislatif tertinggi
memberikan dukungan bagi kampanye ini
lewat GBHN (1983). Selain Bulan PMI yang
kurang meriah, kampanye P3B merupakan
satu-satunya hari besar dan program resmi
yang dirayakan setiap tahun selama sebulan
penuh sebagai "Bulan Bahasa".

Di berbagai masyarakat lain di dunia, pengendalian bahasa juga merupakan bagian dari dinamika jatuh-bangunnya Negara. Walau tak bersifat langsung, seragam atau mutlak, kadar kefanatikan melaksanakan program itu tampaknya sesuai dengan kadar ketegangan ideologi, ekonomi atau politik Negara.¹³⁾

Pembentukan awal lembaga yang diundang-undangkan Negara sebagai badan pembakuan bahasa resmi pada abad 18, bersamaan dengan pembentukan Perancis sebagai salah satu bangsa-negara moderen yang paling dini.¹⁴⁾

Tata-bahasa dan kamus yang pertama di dunia disusun Elio Antonio de Nebrija pada 18 Agustus 1492, sebagai upaya sadar dan sengaja menindas bahasa-bahasa yang sedang hidup dalam masyarakat di luar kendali keraton Kastilia! Nebrija adalah kolega Columbus. Jika

Columbus memperlebar sayap kekuasaan keraton secara teritorial dengan pelayaran dan pembantaian penduduk asli Amerika, Nebrija menggarap bidang bahasa dengan menjajah kehidupan sosial rakyat di negeri sendiri.¹⁵⁾

Tidak semua usaha penjajahan lewat bahasa itu berhasil mutlak. Proyek Nebrija berhasil, tapi bukan tanpa perlawanan gigih dari bahasa Katal.¹⁶⁾ Proyek P3B sudah cukup ekstensif tapi mungkin belum dapat dikatakan hegemonik. Mungkin karena ini juga belum muncul perlawanan yang kukuh dan menonjol terhadapnya.

Di banyak negara lain yang dianggap "demokratis", bukannya tak terjadi penindasan bahasa oleh

Bahasa dapat disimak dari Anton M. Moeliono, *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1985), hal 17-18.

¹³⁾Ini menunjukkan bahwa tingkah Negara atas bahasa bukanlah sekedar memutar-balik makna kata (eufemisme politik) seperti yang sudah sering disebut orang. Di Indonesia sudah sering disebut-sebut contoh seperti "diamankan", "dimintai keterangan", atau "dibina". Di luar negeri dikenal contoh-contoh "Tata Dunia Baru", "bantuan asing".

¹⁴⁾Lihat Geoffrey Benjamin, *The Unseen Presence: A Theory of the Nation-State and Its Mystification*, (Singapore: National University of Singapore 1988) mengenai pengertian bangsa-negara "moderen" dan padanannya yang "pra-moderen", juga mengenai hubungan timbal-balik antara kebangkitan bangsa-negara moderen ini dan pembakuan bahasa resmi.

¹⁵⁾Ivan Illich, "Vernacular Values", *Co-Evolution Quarterly*, Summer, (1980): 23-49.

¹⁶⁾Dalam sejarah panjang jatuh-bangun perjuangan bertahan-diri melawan agresor bahasa Kastilia dari pusat pemerintahan Spanyol, bahasa Katal pernah (1939-1945, yakni pada masa pemerintahan Franco) mengalami nasib seperti bahasa Cina di Indonesia pada masa Orde Baru. Bahasa itu dilarang digunakan secara umum, buku-buku yang diterbitkan dalam bahasa/akasara itu dibakari. Ini merupakan satu-satunya kasus dalam sejarah peradaban manusia di luar Orde Baru Indonesia yang pernah saya dengar tentang suatu pemerintahan yang secara blak-blakan dan lingkup nasional menindas dalam bentuk larangan resmi suatu bahasa yang hidup di negerinya. Lihat David D. Laitin, "Linguistic Revival: Politics and Culture in Catalonia", dalam *Society for Comparative Study of Society and History*, 31, (1989): 297-317. Dalam percakapan lisan George Yunus Aditjondro menambahkan bahwa bahasa Portugis mengalami nasib serupa di Timor Timur pada saat ini.

Negara. Amerika Serikat suka menupuk-dada sebagai negeri yang paling demokratis dalam menghormati kebhinekaan suku, budaya dan bahasa rakyatnya yang majemuk. Mitos ini runtuh secara dramatik, mendahului runtuhnya rejim konservatif Bush, lewat kerusuhan di California April/Mei lalu. Jauh sebelumnya mitos itu sudah diinjak-injak oleh kebijakan rejim Reagan (pendahulu Bush yang ultra-konservatif) dengan upaya menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi dan bahasa nasional dalam rangka menindas kaum minoritas.¹⁷⁾

Jika benar kontrol bahasa secara terlembaga penting bagi pembentukan dan pengukuhan kekuatan Negara, khususnya Negara yang anti-rakyat, maka bisa dibayangkan gejala itu menonjol pada Negara yang berwatak Totalitarianisme.¹⁸⁾ Totalitarianisme punya pengertian yang majemuk dan sering kabur, maka perlu dipertegas.

DEFINISI DAN RAGAM-RAGAM TOTALITARIANISME

Dalam bahasan disini Totalitarianisme digunakan sebagai kategori yang relatif. Artinya, sifat totali-

¹⁷⁾ Heidi Tarver, "Language and Politics in the 1980s: The Story of U.S. English", dalam *Politics and Society*, 17, 2, (1989): 225-245.

¹⁸⁾ Rumusan hipotetis ini tidak mengklaim hubungan antara kontrol bahasa dan Totalitarianisme bersifat otomatis/mekanis,

tarian ada dalam semua Negara moderen, apalagi pada abad 20 yang ditandai oleh tingkat militerisme luar biasa. Yang membedakan satu Negara dari lainnya hanya besar-kecil dan kombinasi salah satu atau lebih sifat-sifat Totalitarian, yakni: (i) tak ada lembaga (pendidikan, kebudayaan, keagamaan, ekonomi, sosial) yang mandiri -- baik tujuan, keanggotaan maupun kegiatannya di bawah kontrol, 'restu' dan 'pembinaan' Negara; (ii) tak ada kebebasan berserikat mau pun berbicara -- hampir semua forum komunikasi dikuasai Negara; (iii) digunakannya bentuk-bentuk terorisme oleh Negara untuk 'mengamankan' para pembangkang; (iv) adanya dominasi sebuah partai yang berkuasa dan ideologi yang kuat.¹⁹⁾

Dalam ilmu-ilmu sosial Totalitarianisme merupakan istilah generik untuk mengacu berbagai ragam rejim abad 20, baik yang Komunis (seperti di Soviet di jaman Stalin) mau pun yang Anti-Komunis (seperti Nazi Jerman di bawah Hitler dan Fasisme Italia di bawah Mussolini).²⁰⁾

langsung, mutlak atau seragam. Totalitarianisme bukan satu-satunya rejim yang melembagakan kontrol bahasa, tapi kontrol bahasa jelas mendapat lahan yang sangat subur dalam Totalitarianisme.

¹⁹⁾ Roger Scruton, *A Dictionary of Political Thought*, (New York: Harper & Row, 1982), hal. 466-467; dan Allan Bullock dkk. (eds), *The Fontana Dictionary of Modern Thought* (London: Fontana Press, 1988), hal. 865.

²⁰⁾ Pengertian yang paling umum untuk Totalitarianisme memang diangkat dari pengamatan para ahli ilmu sosial terhadap kasus empirik tiga rejim tersebut. Jika pengertian itu

Berdasarkan rincian konsep Carl Friedrich tentang Totalitarianisme yang mirip di atas, Arief Budiman pernah menulis bahwa Negara Orde Baru bersifat otoriter, tapi tidak totalitarian "kalau menurut definisi formalnya". Sebab, di Indonesia ada lebih dari satu partai. "Ada pemilihan umum ... Ada parlemen, dan sebagainya." Tapi, ditambahkannya, "kecenderungan kearah totalitarianisme memang ada."²¹⁾

Lebih umum Arief menilai berbagai rejim Dunia Ketiga kurang tepat disebut totaliter Fasis ataupun Komunis. Alasannya, di berbagai negara itu "tidak ada ideologi kuat yang mengikat. Bahkan terjadi proses de-politisasi dan de-ideologisasi".²²⁾ Penilaian Arief ini layak ditinjau-ulang. Tapi terlebih dulu pengertian Fasisme perlu diperjelas. Arief tidak menguraikannya.

Scruton mendefinisikan Fasisme sebagai rejim yang bersifat "nasionalistik, benci demokrasi, menolak persamaan-derajat dan pencerahan liberal, suka mengganggu-agungkan pemimpin yang berkuasa, tunduk pada organisasi bersama, serta gandrung pada lambang-lambang kekuasaan (suka memakai baju

seragam, berpawai dan disiplin militer)."²³⁾

Bertolak-belakang dengan pandangan Arief, Scruton menunjukkan bahwa Fasisme memang tak pernah punya ideologi dengan isi yang jelas, fungsinya hanya memobilisir enersi massa.²⁴⁾ Hal ini tercermin dari ucapan Mussolini, Bapak Fasisme, yang mendiskripsikan Fasisme secara serba negatif: bukan ini, bukan itu ("bukan republikan, bukan sosialis, bukan demokrat, bukan konservatif, atau nasionalis").

Seperti Scruton, Nicohlas Abercrombie dkk. menegaskan bahwa Fasisme "tidak mempunyai filsafat politik yang matang dan terpadu". Ciri pandangan politik Fasisme, menurut mereka, ialah mengunggul-unggulkan "nasionalisme, kebencian pada komunisme, mencurigai politik demokratis, pengabdian pada negara berpartai tunggal dan pemimpin karismatik. Fasisme memuliakan kekerasan ..." Mereka mengutip N. Poulantzas yang berpandangan bahwa Fasisme

hendak kita pakai secara umum (generik) untuk kasus-kasus lain, maka tak mungkin kita memakainya secara ketat seakan-akan kondisi kesejarahan ketiga rejim sebelum Perang Dunia II itu bisa terulang secara persis di masyarakat dan jaman lain. Karena itu saya cenderung menggunakannya secara longgar sebagai kategori yang relatif.

²¹⁾"Kebudayaan Kekuasaan atau Sosiologi Kekuasaan", *Prisma*, Vol. 16, 3, (1987): 67.

²²⁾*Ibid.*, hal. 63.

²³⁾Scruton, *Dictionary...*, hal 169. Definisi yang mirip juga diberikan Bullock (*The Fontana ...*, hal. 309) dengan kata-sifat yang lebih keras: "nasionalistik keras, anti-komunis dan anti-Marxist secara hebat, membenci liberalisme, demokrasi dan partai parlementer ... Dalam menjalankan kampanye politik, mereka mengandalkan propaganda dan terorisme; jika berhasil meraih kekuasaan mereka akan membasmi saingan-saingannya tanpa memperdulikan hukum yang berlaku. ... Memuja-muja peperangan, kekerasan, ... baju seragam, kepangkatan, sapaan hormat dan pawai memberikan watak paramiliter."

²⁴⁾Scruton, *A Dictionary...*, hal. 169.

timbul akibat krisis bukan saja di bidang ekonomi (seperti dikutip Arief) tapi juga ideologi.²⁵⁾

TOTALITARIANISME, ILMU- WAN, DAN BAHASA

Militansi pembakuan, pembinaan dan pengembangan bahasa resmi tidak dengan sendirinya membuktikan atau menciptakan Totalitarianisme. Tapi Totalitarianisme pasti menyambut baik militansi pembakuan bahasa, karena cocok dengan fanatisme nasionalistiknya, pemuliaan dan pemusatan kekuasaan Negara, penindasan otonomi masyarakat dan simbol-simbol keseragaman. Kebijakan bahasa pada masa awal Totalitarianisme di Eropa menjadi topik kajian yang menarik beberapa sarjana belakangan ini.²⁶⁾

Dalam kajiannya tentang kebijakan bahasa di masa Fasisme Itali, Gabrielle Klein mencatat ciri-ciri

fokus program pendidikan bahasa di sekolah: pembakuan yang bersifat "endronormative" (berkiblat pada sumber yang dianggap pribumi), "monocentric" (berdasarkan seperangkat norma yang diberlakukan secara universal) dan "formal" (yang terkodifikasi secara resmi), kesibukan membenahi ejaan yang "salah", "pengajaran tata-bahasa berdasarkan definisi dan aturan yang serba abstrak".²⁷⁾ Di luar pagar sekolah, terdapat kesibukan "cultivation-approach" (pembinaan), khususnya dalam bidang pemurnian bahasa, dengan "xenophobia" (anti-asing), dan "policy-approach" (kebijakan) demi menjaga stabilitas bahasa Italia baku di tengah ancaman bahasa dan dialek kaum minoritas.²⁸⁾

Kaitan antara Totalitarianisme dan lembaga kebijakan bahasa dapat dipahami secara lebih umum dan sekaligus lebih mendalam. Dengan meminjam wawasan Foucault tentang "carceral society" (masyarakat mutakhir yang seperti penjara), kita tidak lagi mempersoalkan apa persisnya isi pendidikan, pengembangan dan pembinaan bahasa yang disponsori Negara. Proyek itu dapat ditinjau pertama-tama dan terutama membina masyarakat untuk senantiasanya merasa serba salah, termasuk berbahasa. Bahwa ada suatu pusat kebenaran dan kewibawaan yang bisa memperbaiki atau menghukum. Sehingga mereka terdidik untuk selalu merasa layak "diamankan",

²⁵⁾ Nicholas Abercrombie dkk., *Dictionary of Sociology*, (London: Penguin 1988), hal. 96.

²⁶⁾ Christopher Sauer, "Structures of consensus-making and intervention: the concept of Nazi language policy in occupied Holland"; Gabrielle Klein, "Language policy during fascist period: the case of language education"; dan Rosita Rindler Schjerve, "The political speech of Futurism and its relationship to Italian Fascism" merupakan tiga karangan pembuka dalam sebuah kumpulan esei yang disunting Ruth Wodak, *Language, Power and Ideology*, (Amsterdam: John Benjamins 1989).

²⁷⁾ Ibid. hal. 41-45.

²⁸⁾ Ibid. hal. 49-50.

"dibina", atau dihukum.²⁹⁾

Jika ditinjau pada dataran ini kelihatan betapa pentingnya dan betapa luasnya lingkup persoalan kita. Jauh melampaui seluk-beluk ejaan dan pembakuan kata, bahkan seluruh kerja P3B itu sendiri. Yang terjadi bukan sejumlah pembakuan istilah, tapi pengukuhan tata hidup bermasyarakat yang tunduk pada suatu pusat kekuasaan. Regim berpikir ala "bahasa yang baik dan benar" telah melanda kehidupan berbahasa yang tidak sepenuhnya ciptaan kolonial yakni bahasa Jawa.³⁰⁾ Juga di bidang lain: kesehatan, kecantikan, kemesraan, pengetahuan, dan seni.

Acuan pada Foucault membawa kita pada pertanyaan penting tentang peran ilmu dan ilmuwan bahasa. Apakah proyek P3B lebih banyak mengungkapkan minat dan kepentingan ilmuwan atau Negara? Benarkah keduanya identik? Bukankah ilmuwan kita (apalagi linguist) sangat apolitis? Bukankah dalam kasus Orde Baru, telah terbukti para pejabat elit Negara menjadi bulan-bulan kritik kampanye P3B, sebab mereka dituduh kurang berbahasa

secara "baik dan benar"? Ingat kasus lafal /kan/ yang diucapkan /ken/?³¹⁾

Ruang yang tersisa tak memungkinkan penjelajahan jawaban yang memadai. Hanya beberapa pokok pikiran ingin saya catat disini. Pertama, ada beda antara minat serta kepentingan individu-individu pejabat Negara dan kepentingan Negara sebagai sebuah badan. Kebijakan bahasa bisa membebani pribadi pejabat yang sedang berkuasa, tapi menguntungkan Negara secara keseluruhan. Pada kasus lain bisa juga menguntungkan keduanya.

Kedua, ilmuwan tak pernah bebas dari kuasa dan politik, juga linguist yang kelihatannya hanya sibuk menjungkir-balik ejaan kata, awalan, atau bunyi kata. Ia dan kerjanya dibentuk dari-oleh-untuk kuasa, walau tidak langsung bersifat kekuasaan politik kenegaraan. Kerja para ilmuwan dalam kaitan dengan P3B boleh saja tidak sepenuhnya dimaksudkan untuk terlibat dengan kepentingan Negara (apalagi mengabdikan jabatannya), tapi juga jelas tak pernah bebas darinya. Tidak percuma Negara mendukungnya.

Ketiga, saya sering menerima sanggahan yang mempertanyakan: bagaimana mungkin ilmu di Indonesia dapat dikembangkan tanpa pembinaan, pengembangan dan pembakuan bahasa, minimal di lingkungan terbatas masyarakat

²⁹⁾ Michel Foucault, *Discipline and Punish; The Birth of the Prison*, terjemahan Alan Sheridan, (London: Penguin 1977). Pandangan Foucault bukannya bebas-kritik, tapi bukan disini tempatnya menimbang pelik-pelik karya Foucault. Lihat misalnya, kritik cermat dari M.J. Merquior, *Foucault*, (London: Fontana Press, 1985).

³⁰⁾ Lihat tulisan saya "Bahasa Jawa Masuk Sekolah 1986/1987", *Suara Merdeka*, 17 Juli 1986. 2.

³¹⁾ George Yunus Aditjondro menambahkan bahwa kritik terhadap lafal ini tidak hanya bertolak dari pertimbangan kebahasaan, tetapi juga politik.

akademik, khususnya ilmu-ilmu pasti dan alam yang relatif universal? Jawabnya tidak dapat dicari dalam paradigma ilmu-ilmu itu sendiri secara murni. Tapi sebuah pertanyaan sejarah dan sosiologis: mungkinkah kekuasaan Negara berkembang tanpa ilmu-ilmu itu? Juga sebaliknya, mungkinkah ilmu-ilmu itu berkembang tanpa perkembangan Negara?

Ilmu (seperti halnya seni) tak pernah menempati sebuah "lingkungan terbatas". Isolasi itu hanyalah sebuah ilusi. Ilusi inilah yang memungkinkan banyak ilmuwan merasa netral dan bebas dari gejolak sosial-politik serta tidak ikut bertanggung-jawab atas sejarah sosial di saat menekuni kerja spesialisasinya.

Pada masa jaya rasialisme Nazi, ideologi Negara merambah ilmu, termasuk ilmu alam, tanpa si ilmuwan menyadarinya. Sekan-akan ada "Ilmu alam Nazi" yang baik dan benar, berlawanan dengan "Ilmu alam Jahudi".³²⁾ Jagad-raja dibelah menjadi dua kekuatan ekstrem yang bertentangan: Arya versus Jahudi. Para algojo Nazi tak merasa melakukan kekejaman ketika membantai kaum Jahudi. Mereka merasa gagah berani membela bangsanya.

Kesimpulan penutup dari seluruh uraian di atas ialah: pengkajian kebijakan bahasa tak bisa ditem-

patkan pada "lingkungan terbatas" linguistik yang memperlakukan bahasa sebagai alat-komunikasi dalam Pembangunan. Pengkajian bahasa, cepat atau lambat menghantar kita pada pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hakekat dan sejarah Negara serta ilmu(wan). Kontrol terhadap masyarakat tidak terjadi sebatas program P3B. Maka yang paling mengkhawatirkan bukan program P3B itu sendiri.

E R R A T A

Kritis Edisi No. 1/Th. VII, Juli 1992, judul Artikel BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN KOGNITIF ANAK.

p. 10, kolom kiri, baris 1 dari bawah dan kolom kanan, baris 2 dari atas, tertulis pendidikan ayah (3 - SMA ke atas) dan ibu (4 - SMA ke atas), seharusnya (3 - SMP ke atas) dan (4 - SMP ke atas).

³²⁾Lihat Stanley K. Shemock, "The Refractory Aspect of Terror in Movement-Regimes", dalam *State Organized Terror*, disunting Timothy Bushnell dkk, (Boulder: Westview Press, 1991), hal. 183-184. Walau tak persis sama, dapatkah ini dibandingkan dengan "Pers Pancasila", "Ekonomi Pancasila", "Demokrasi Pancasila"?